



The Japanese Officials' Resignation Phenomenon: Political Accountability Lessons for Indonesia's Democratic System

Fenomena Resign Pejabat Jepang: Pelajaran Akuntabilitas Politik untuk Sistem Demokrasi Indonesia

Arazid Arazid

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Arazid Arazid

✉ arazidfh@gmail.com

History:

Submitted: 12-01-2026

Revised: 22-02-2026

Accepted: 28-02-2026

Keyword:

Political Accountability, Policy Learning, Jiko Sekinin, Comparative Politics, Ethical Governance.

Kata Kunci:

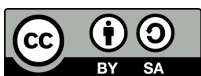
Akuntabilitas Politik, Pembelajaran Kebijakan (Policy Learning), Jiko Sekinin, Politik Perbandingan, Tata Kelola Etis.

Abstract

Manifestations of political accountability, a pillar of democracy, differ significantly across Asia. This study employs a comparative case study approach to analyze the stark contrast between Japan's culture of honorable resignation and Indonesia's sluggish, formal-legal accountability. In Japan, the resignation of public officials functions as a political risk governance mechanism, driven by the cultural norm of jiko sekinin (self-responsibility) and reinforced by potent diagonal accountability from the media. This process rapidly transfers the political cost of failure from the collective to the individual. Conversely, accountability in Indonesia is hampered by systemic challenges, including oligarchy and a weak internalization of ethics, making it dependent on legal sanctions rather than cultural imperatives. The study concludes that the most effective policy learning for Indonesia is not the direct imitation of resignation but the strategic adaptation of the jiko sekinin principle to strengthen the 'sense of ethics' and integrity within its bureaucracy.

Abstrak

Manifestasi akuntabilitas politik sebagai pilar demokrasi menunjukkan perbedaan signifikan di Asia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus komparatif untuk menganalisis kontras tajam antara budaya pengunduran diri terhormat di Jepang dengan akuntabilitas yang lambat dan formal-legal di Indonesia. Di Jepang, pengunduran diri pejabat publik berfungsi sebagai mekanisme tata kelola risiko politik, didorong oleh norma kultural jiko sekinin (tanggung jawab diri) dan diperkuat oleh akuntabilitas diagonal yang kuat dari media. Proses ini secara cepat mentransfer biaya politik dari kegagalan kolektif ke individu. Sebaliknya, akuntabilitas di Indonesia terhambat oleh tantangan sistemik, termasuk oligarki dan lemahnya internalisasi etika, yang membuatnya bergantung pada sanksi hukum alih-alih imperatif kultural. Studi ini menyimpulkan bahwa policy learning yang paling efektif bagi Indonesia bukanlah meniru tindakan resignasi, melainkan adaptasi strategis prinsip jiko sekinin untuk memperkuat sense of ethics dan integritas dalam birokrasi.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA)

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Akuntabilitas politik berfungsi sebagai pilar utama yang menopang legitimasi sistem demokrasi. Di tengah meningkatnya krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah secara global, praktik pertanggungjawaban pejabat publik menjadi sorotan utama. Asia menawarkan kontras menarik dalam manifestasi akuntabilitas ini. Di satu sisi, Jepang, sebagai salah satu negara demokrasi tertua dan paling stabil di Asia, menunjukkan tradisi pengunduran diri pejabat sering kali disebut 'mundur terhormat' bahkan ketika hanya terjadi penurunan popularitas atau skandal etika non-hukum. Fenomena ini mencakup pengunduran diri Perdana Menteri seperti Yoshihide Suga karena kegagalan merespons tuntutan populer (misalnya, penanganan pandemi COVID-19 dan Olimpiade) dan Shigeru Ishiba setelah kekalahan elektoral yang signifikan, meskipun masa jabatannya belum genap setahun [1].

Di sisi lain, Indonesia, sebagai sistem demokrasi gelombang ketiga pasca-Reformasi, masih berjuang menghadapi tantangan etika publik yang akut. Penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia masih tinggi, dengan pejabat publik sebagai pelaku dominan. Kondisi ini dipicu oleh faktor-faktor internal seperti keserakahan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya akuntabilitas yang melekat pada individu aparatur negara [2]. Perbandingan ini menyoroti adanya dualitas dalam praktik akuntabilitas di Asia: akuntabilitas kultural yang cepat di Jepang versus akuntabilitas formal-legal yang lambat di Indonesia.

Studi Louis Bodmer (2022) tentang akuntabilitas politik telah lama memanfaatkan tipologi klasik yang membedakan antara akuntabilitas vertikal (melalui pemilihan), horizontal (antarlembaga negara), dan diagonal (melalui media dan masyarakat sipil) [3]. Di Jepang, meskipun keterlibatan warga secara umum cenderung terbatas, yang mengindikasikan rendahnya akuntabilitas vertikal, mekanisme akuntabilitas diagonal memainkan peran penting. Media, misalnya, bertindak sebagai *agenda setter* dan sangat efektif dalam menuntut transparansi, bahkan pada isu-isu pendanaan politik faksi yang sensitif [4].

Studi Mulyahati & Rasiban (2021) telah mengulas perbedaan antara demokrasi Jepang dan Indonesia, terutama dalam isu-isu seperti representasi perempuan di politik dan partisipasi sipil kaum muda. Namun, jarang ditemukan kajian yang secara eksplisit membandingkan budaya akuntabilitas politik non-institusional, seperti tradisi resignasi

kehormatan, sebagai fokus utama untuk pembelajaran kebijakan (*policy learning*) [5]. Studi Sani & Fathurrahman (2023) mengenai difusi kebijakan (*policy diffusion*) dan transfer kebijakan (*policy transfer*) mencatat bahwa adopsi ide-ide internasional ke Indonesia seringkali dilakukan melalui *strategic adaptation* alih-alih replikasi langsung. Kerangka ini penting untuk menilai seberapa jauh norma akuntabilitas kultural dapat dipindahtangankan [6].

Penelitian ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara analisis akuntabilitas *institusional* di Jepang yang berfokus pada skandal fraksi LDP, reformasi pendanaan, dan dominasi birokrasi *kyaria* dengan studi *etika normatif* di Indonesia yang berpusat pada pencegahan korupsi dan implementasi *good governance*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran kerangka *Policy Learning of Cultural Accountability*. Ditegaskan bahwa fenomena pengunduran diri pejabat Jepang merupakan manifestasi politik dari diskursus *jiko sekinin* (tanggung jawab diri), di mana individu harus menanggung konsekuensi risiko yang gagal dimediasi oleh jabatannya. Konsep *jiko sekinin* memindahkan lokus tanggung jawab dari kelompok (*rentai sekinin*) ke individu. Pembelajaran ini sangat relevan bagi Indonesia untuk memperkuat internalisasi *sense of ethics* dalam birokrasi, yang saat ini masih lemah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengunduran diri pejabat di Jepang berfungsi sebagai mekanisme *risk governance* politik, secara efektif mentransfer biaya kegagalan politik dan skandal etika dari Partai Liberal Demokrat (LDP) secara kolektif ke individu yang harus bertanggung jawab. Proses ini didorong oleh norma kultural kehormatan dan tekanan dari akuntabilitas diagonal. Sebaliknya, Indonesia menghadapi hambatan struktural yang khas bagi *Low-Capacity Democracy*, di mana akuntabilitas didikte oleh legalitas formal dan bukan oleh imperatif kultural. Oleh karena itu, *Policy Learning* yang paling efektif bagi Indonesia adalah melalui adaptasi strategis norma *jiko sekinin* menjadi penguatan sistem internalisasi Etika Administrasi Publik yang ketat dan konsekuen, mengatasi defisit *sense of ethics* di luar sanksi hukum.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan studi yang diidentifikasi, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama:

- a. Bagaimana mekanisme kultural dan institusional di Jepang mendorong pengunduran diri pejabat publik sebagai bentuk akuntabilitas politik non-hukum?

- b. Apa tantangan struktural dan kultural mendasar yang menghambat penegakan akuntabilitas etis pejabat publik di Indonesia pasca-Reformasi?
- c. Bagaimana kerangka *Policy Learning* dapat diterapkan untuk mengadopsi pelajaran akuntabilitas kultural dari Jepang ke dalam sistem demokrasi dan birokrasi Indonesia?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi Pendekatan Kualitatif dengan desain Studi Kasus Komparatif (*Comparative Case Study*). Metode komparatif ini merupakan metode tertua dalam analisis politik dan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi ciri-ciri sistem politik yang berbeda, menjelaskan fenomena spesifik, dan memahami cara kerja sistem akuntabilitas di dua negara dengan latar belakang budaya dan perkembangan demokrasi yang berbeda namun sama-sama berada di Asia.

Pengumpulan data dilakukan melalui *Systematic Literature Review* (SLR) yang difokuskan pada jurnal akademik terindeks Scopus dan laporan-laporan institusional. Data yang dikumpulkan mencakup analisis akuntabilitas politik Jepang (terutama kasus resignasi dan skandal 2015-2025) dan tantangan etika publik/korupsi di Indonesia (2015-2025).

Analisis data dilakukan melalui *Content Analysis* dan *Thematic Analysis*. Langkah ini mencakup reduksi, klasifikasi, dan interpretasi temuan. Secara khusus, analisis membandingkan pemicu (skandal vs. kinerja), respons institusional (reformasi vs. penegakan hukum), dan konsekuensi politik di kedua negara. Analisis interpretatif kemudian digunakan untuk menilai manifestasi praktis dari teori akuntabilitas (Bovens et al.) dan konsep kultural (*jiko sekinin*) dalam menghasilkan norma konsekuensi politik yang berbeda.

B. PEMBAHASAN

1. Kasus Jepang: Akuntabilitas Prinsipil sebagai Mekanisme Kultural

a. Pemicu dan Mekanisme Resignasi Politik

Fenomena pengunduran diri pejabat tinggi di Jepang seringkali dipicu oleh dua kategori utama: kegagalan kinerja/elektoral dan skandal etika. Contohnya, PM Suga terpaksa mundur akibat penurunan popularitas yang tajam dan kegagalan dalam memenuhi janji reformasi atau merespons tekanan publik terkait pandemi dan Olimpiade [7]. Pada kasus lain, skandal seperti hubungan Partai Liberal

Demokrat (LDP) dengan Gereja Unifikasi dan skandal dana politik, di mana faksi-faksi besar (termasuk faksi Abe dan Nikai) gagal melaporkan hingga 800 juta yen pendapatan dari penggalangan dana, memicu krisis etika parah [8].

Skandal-skandal ini menciptakan divisi internal yang mendalam di LDP. Meskipun faksi formal dibubarkan sebagai respons, analisis mencatat bahwa ketiadaan faksi justru membuat manajemen keretakan internal menjadi lebih sulit. Ini menciptakan tekanan horizontal yang kuat, memaksa pemimpin partai (seperti Fumio Kishida) untuk menunjukkan komitmen reformasi yang nyata, termasuk membersihkan internal partai dan memperketat aturan kampanye [9].

Pengunduran diri ini, baik karena kinerja maupun skandal etika, berfungsi sebagai mekanisme transfer biaya politik (*Cost Transfer*). Ketika krisis etika atau kegagalan kepemimpinan mengancam legitimasi LDP secara keseluruhan, individu yang paling bertanggung jawab atau individu yang gagal memimpin reformasi dipaksa mundur. Tindakan ini merupakan pengorbanan individu yang melindungi kehormatan kolektif partai, mengisolasi "penyakit" politik pada individu tersebut. Resignasi di Jepang, dengan demikian, melampaui rasa malu pribadi; itu adalah alat *risk governance* politik yang cepat untuk menormalkan kembali sistem di mata publik dan memulihkan reputasi partai [1].

b. Peran Akuntabilitas Diagonal dan Kultural

Akuntabilitas di Jepang sangat bergantung pada kekuatan pengawasan diagonal. Media, baik lokal maupun nasional, memainkan peran krusial. Studi menunjukkan bahwa kehadiran surat kabar nasional berfungsi sebagai *agenda setter*, melengkapi surat kabar lokal dalam meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi praktik rent-seeking (misalnya, mengurangi pengeluaran publik yang tidak perlu). Tekanan dari opini publik yang diwakili dan diperkuat oleh media secara efektif menuntut transparansi dan konsekuensi, meskipun tingkat partisipasi politik warga negara secara langsung (akuntabilitas vertikal) dinilai terbatas [4].

Aspek kultural yang mendukung adalah *jiko sekinin*. Konsep ini menanamkan ekspektasi bahwa pejabat harus memiliki kapasitas untuk memediasi risiko politik yang melekat pada jabatan mereka. Ketika kegagalan terjadi apakah itu berupa skandal finansial, kegagalan kebijakan besar, atau kehilangan popularitas pejabat harus menanggung konsekuensinya secara terhormat melalui pengunduran diri. Standar kehormatan ini menciptakan sistem etika yang bersifat konsekuensial, di

mana dampak politik sering mendahului tuntutan hukum.

2. Kasus Indonesia: Akuntabilitas Lambam dan Tantangan Institusional

a. Diagnosis Defisit Akuntabilitas dan Etika Publik

Berbeda dengan Jepang, tantangan akuntabilitas di Indonesia didiagnosis sebagai defisit etika dan korupsi yang meluas. Praktik korupsi didominasi oleh pejabat publik dan dipicu oleh faktor-faktor internal seperti keserakahan, didukung oleh lemahnya pengawasan dan rendahnya akuntabilitas [2].

Meskipun Etika Administrasi Publik diposisikan sebagai pedoman moral dan instrumen preventif yang krusial, penerapannya di lapangan masih lemah. Sistem reformasi dan upaya adopsi prinsip-prinsip *New Public Service* (NPS) seringkali dianggap tidak memadai untuk mengatasi korupsi yang telah mengakar dalam budaya birokrasi, diperparah oleh penyimpangan sistem nilai, penyalahgunaan wewenang, dan intervensi kekuasaan dalam praktik birokrasi [10].

Defisit ini menunjukkan adanya masalah dalam internalisasi nilai. Meskipun pejabat publik dituntut memiliki *sense of ethics* dan berpegangan pada kode etik, kenyataannya akuntabilitas di Indonesia lebih berlandaskan pada hukum positif. Pejabat publik cenderung mundur atau dipaksa berhenti hanya jika menghadapi ancaman sanksi hukum formal atau penangkapan, bukan karena kegagalan politik berbasis kehormatan atau etika non-hukum [11].

b. Hambatan Struktural: Oligarki dan Kapasitas Demokrasi Rendah

Defisit akuntabilitas di Indonesia diperkuat oleh hambatan struktural yang menghambat penegakan etika politik. Demokrasi Indonesia mengalami stagnasi, bahkan kemunduran (*democratic backsliding*), yang disebabkan oleh isu-isu sistemik seperti politik dinasti, personalisasi politik, dan oligarki yang mendominasi partai politik [12].

Lembaga pengawasan horizontal, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengalami pelemahan, dan transparansi dalam pengelolaan dana publik masih rendah, memicu meluasnya praktik politik transaksional. Selain itu, partai politik di Indonesia pasca-Reformasi dinilai gagal berkembang menjadi institusi publik yang sepenuhnya bertanggung jawab kepada pemilih, menunjukkan kurangnya akuntabilitas internal yang kuat [13]. Hal ini menciptakan kondisi *Low-Capacity Democracy* di mana akuntabilitas formal mudah dikalahkan oleh perlindungan politik oligarkis. Di Indonesia, konsekuensi politik seringkali

dihindari melalui manuver hukum atau perlindungan partai, sangat berlawanan dengan praktik *cost transfer* cepat di Jepang.

3. Disintesis Komparatif: Dualitas Akuntabilitas Politik Asia

Perbandingan antara Jepang dan Indonesia menyingkap dualitas mendasar dalam budaya politik Asia. Jepang menekankan akuntabilitas yang bersifat prinsipil dan kultural, di mana biaya politik dari kegagalan ditanggung secara cepat oleh individu. Sebaliknya, Indonesia menunjukkan akuntabilitas yang lamban dan terikat pada kerangka hukum, seringkali terhambat oleh kepentingan struktural. Tabel 1 berikut menyajikan perbandingan mendasar antara mekanisme akuntabilitas di kedua negara:

Table 1. Perbandingan Mekanisme Akuntabilitas Politik: Jepang vs. Indonesia

Dimensi	Jepang (Kultural/Prinsipil)	Indonesia (Formal/Lembam)	Implikasi Komparatif
Pemicu Resignasi	Kehilangan kepercayaan publik, kegagalan elektoral, skandal etika/dana non-hukum	Skandal Korupsi/Pelanggaran Berat yang berujung pada sanksi hukum/penangkapan	Jepang: <i>Political Cost</i> tinggi, Indonesia: <i>Legal Cost</i> tinggi.
Locus Akuntabilitas	Individu (<i>Jiko Sekinin</i>) demi kehormatan partai/negara	Institusional/Hukum, sering terlindungi oleh oligarki partai	Perbedaan mendasar dalam internalisasi nilai: Kehormatan vs. Kepatuhan Hukum.
Peran Pengawas Diagonal	Kuat; media berperan sebagai <i>agenda setter</i> yang menuntut transparansi	Menantang; terhalang oleh dominasi eksekutif dan masalah digital/disinformasi	Akuntabilitas di Jepang sangat bergantung pada tekanan media yang berfungsi.
Tujuan Akhir Resignasi	Rekalibrasi risiko politik dan pemulihan legitimasi partai	Pemenuhan tuntutan hukum dan menghindari sanksi pidana/administratif.	Reformasi di Jepang lebih cepat, di Indonesia lebih fokus

pada
penegakan
hukum
(kurang
preventif).

4. Pelajaran Akuntabilitas Politik dan Policy Learning untuk Indonesia

Pembelajaran kebijakan dari Jepang bagi Indonesia harus dibagi menjadi dua area utama: reformasi institusional dan adaptasi kultural.

a. Policy Learning Tipe Institusional (Struktur dan Transparansi)

Dalam konteks kelembagaan, Indonesia dapat mengadopsi tuntutan transparansi yang muncul dari skandal Jepang. Pelajaran utamanya adalah perlunya reformasi pendanaan politik yang memastikan pelaporan keuangan faksi dan partai yang jauh lebih ketat dan transparan, serupa dengan upaya yang didorong oleh Kishida setelah skandal fraksi LDP [9]. Selain itu, Indonesia harus fokus pada penguatan Akuntabilitas Horizontal Partai. Jepang menunjukkan bahwa krisis faksi dapat memicu reformasi kelembagaan; oleh karena itu, memperbaiki sistem pengawasan internal partai dan mengembalikan independensi lembaga *oversight* (seperti KPK) adalah langkah krusial untuk mengatasi *Low-Capacity Democracy*.

b. Policy Learning Tipe Kultural (Nilai dan Etika)

Pembelajaran paling berharga adalah mengenai internalisasi etika, di mana norma *jiko sekinin* dapat diterjemahkan. Konsep ini harus diadaptasi sebagai 'tanggung jawab konsekuensial' yang menuntut pejabat publik yang gagal menjaga integritas atau kinerja harus segera mengambil konsekuensi politik terhormat (mundur), bahkan sebelum proses hukum selesai. Ini akan membantu menumbuhkan *sense of ethics* di luar batasan hukum positif [11]. Strategi yang direkomendasikan adalah mendorong model etika terintegrasi (seperti model I-EdMP yang diusulkan dalam studi Indonesia) yang memprioritaskan kejujuran, integritas, dan pengutamaan kepentingan publik sebagai alternatif untuk memperkuat sistem reformasi [10].

c. Tantangan Policy Transfer: Konteks Budaya dan Adaptasi

Tentu, mentransfer norma kehormatan Jepang ke Indonesia menghadapi tantangan signifikan. Tradisi kehormatan Jepang terkait erat dengan sistem birokrasi *kyaria* yang berakar dari Restorasi Meiji dan budaya konsensus yang

unik.¹⁶ Mentransfernya ke sistem politik Indonesia yang sarat dengan transaksi dan oligarki memerlukan adaptasi mendalam [14].

Policy Learning harus fokus pada penguatan pendidikan antikorupsi dan peningkatan kesadaran aparatur. Adaptasi strategis ini harus dipimpin oleh *policy entrepreneur* domestik yang mampu membingkai ulang norma asing tersebut agar selaras dengan kebutuhan lokal [6].

Table 2. Kerangka Policy Learning Akuntabilitas Kultural untuk Indonesia

Dimensi	Pelajaran dari Jepang (Norma Ideal)	Tantangan Adaptasi di Indonesia	Strategi Policy Learning yang Direkomendasikan (Adaptasi)
Etika Konsekuensi	Pengunduran diri berprinsip (Prinsip Kehormatan/Konsekuensi Politik Cepat)	Politik personalisasi; Pejabat hanya mundur karena sanksi hukum/paksaan.	Internalisasi <i>Sense of Ethics</i> dan Kode Perilaku Konsekuensial (Bukan hanya komitmen, tapi tindakan nyata).
Pengawasan Finansial	Transparansi ketat, media menekan skandal dana faksi	Intransparansi parpol, lemahnya regulasi dana kampanye.	Penguatan undang-undang pendanaan politik dan meningkatkan pengawasan diagonal media/masyarakat sipil.
Kapasitas Institusional	Sistem birokrasi yang kuat (warisan Meiji) dan <i>kyaria</i>	Lembaga pengawas yang dilemahkan; <i>Low-Capacity Democracy</i> .	Membangun kembali independensi lembaga <i>oversight</i> dan membenahi sistem pengawasan serta pendidikan antikorupsi.

C. KESIMPULAN

Fenomena pengunduran diri pejabat Jepang merupakan manifestasi dari mekanisme akuntabilitas politik yang didorong secara kultural (terkait dengan *jiko sekinin* dan norma kehormatan) dan diperkuat oleh akuntabilitas diagonal yang efektif, yang secara cepat mentransfer biaya kegagalan politik dari partai ke individu. Kontras dengan Indonesia, di mana akuntabilitas etis terhambat oleh tantangan institusional seperti oligarki, personalisasi politik, dan rendahnya internalisasi nilai moral, yang menyebabkan akuntabilitas bersifat lembam dan sangat bergantung pada sanksi hukum. Oleh karena itu, pelajaran akuntabilitas bagi demokrasi Indonesia adalah bukan meniru tindakan resignasi semata, melainkan mengadopsi secara strategis kerangka *Cultural Accountability* Jepang untuk memperkuat *sense of ethics* dan internalisasi integritas dalam birokrasi, didukung oleh reformasi pendanaan politik yang transparan dan penguatan lembaga pengawas horizontal, guna mengatasi korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Napitupulu, "Yen Melemah Pasca PM Jepang Shigeru Ishiba Mundur, Bagaimana Dampaknya terhadap Rupiah?," Mistar ID. [Online]. Available: <https://mistar.id/news/ekonomi/yen-melemah-pasca-pm-jepang-shigeru-ishiba-mundur-bagaimana-dampaknya-terhadap-rupiah>
- [2] M. T. Yogi Apriansya and G. Meiwanda, "Korupsi birokrasi dalam etika administrasi publik dan strategi pencegahan korupsi," *J. Adm. Publik dan Bisnis*, vol. 3, no. 2, pp. 1–7, Sep. 2021, doi: 10.36917/japabis.v3i2.45.
- [3] L. Bodmer, *States' Compliance to International Treaties*. Graduate Institute Publications, 2022. doi: 10.4000/books.iheid.8773.
- [4] Y. Yazaki, "Newspapers and political accountability: evidence from Japan," *Public Choice*, vol. 172, no. 3–4, pp. 311–331, Sep. 2017, doi: 10.1007/s11127-017-0444-x.
- [5] T. Mulyahati and L. M. Rasiban, "Analysis of the Gender Equality Application in Japanese and Indonesian Elementary School Education through Class Pickets," *Indones. J. Community Spec. Needs Educ.*, vol. 1, no. 1, pp. 11–14, Mar. 2021, doi: 10.17509/ijcsne.v1i1.32662.
- [6] S. Y. Sani and R. Fathurrahman, "Identifying Trends of Policy Transfer Practices in Indonesia: A Systematic Literature Review (2012 - 2022)," *Asian J. Soc. Humanit.*, vol. 2, no. 2, pp. 1721–1739, Nov. 2023, doi: 10.59888/ajosh.v2i2.131.
- [7] A. Al-Madani, "Why Did the Japanese PM Decide to Step Down?," The Media Line. [Online]. Available: <https://themedialine.org/mideast-mindset/why-did-the-japanese-pm-decide-to-step-down/>
- [8] M. Ichihara, "Vertical Accountability in Japan's Governance: Impact of Public Conception," 2024. [Online]. Available:

https://www.eai.or.kr/press/press_01_view.php?no=11255

- [9] C. de Guzman, "Why Another Japanese Prime Minister Resigned and What Comes Next," *Time*. [Online]. Available: <https://time.com/7315284/shigeru-ishiba-japan-prime-minister-resignation-ldp-future-analysis-explainer/>
- [10] Y. N. Nani, J. Abdussamad, S. Y. Mozin, and R. Tohopi, "Integrating Ethical Values and New Public Services: Strengthening Reform and Anti-Corruption in Indonesia," *J. Gov. Public Policy*, vol. 12, no. 2, pp. 236–249, Jun. 2025, doi: 10.18196/jgpp.v12i2.25937.
- [11] Y. Widyastuti, S. Rahayu, and T. Rizkiyani, "Praktek Etis Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan," *JIPAGS (Journal Indones. Public Adm. Gov. Stud.*, vol. 8, no. 1, pp. 54–63, Jan. 2024, doi: 10.31506/jipags.v8i1.22543.
- [12] J. Kim, "Vertical Accountability: Ten Asian Country Cases," 2024. [Online]. Available: <http://www.adrnresearch.org/publications/list.php?cid=3&pn=1&at=view&idx=384&ckattempt=1>
- [13] M. Huda, M. Muharam, M. A. Affandi, A. S. Adi, S. Swarizona, and E. S. Hermawan, "Indonesia's Struggle For Democratic Resilience: Issues and Institutional Reforms," *Int. J. Law Soc.*, vol. 2, no. 2, pp. 145–153, Feb. 2025, doi: 10.62951/ijls.v2i2.379.
- [14] Z. P. Zulkarnain and E. Prasojo, "Understanding Japan's Civil Service System: Norms, Meritocracy, and Institutional Change," *Policy Gov. Rev.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–17, Nov. 2020, doi: 10.30589/pgr.v5i1.355.